

**EFEKTIVITAS LAYANAN POSBAKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

**Faisal Rama Dani ¹; Andela Z.A.²; Dwi Arlena Salsabila ³; Evta Navtalena ⁴;
Pipi Susanti ⁵**
Universitas Bengkulu

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted 10 November 2024

Accepted 13 November 2024

Published 20 November 2024

ABSTRACT

POSBAKUM (Legal Aid Post) plays a significant role in ensuring access to justice for underprivileged communities. This study aims to analyze the effectiveness of POSBAKUM services at the Bengkulu Religious Court, focusing on its supporting factors, challenges, and recommendations for improvement. A descriptive qualitative approach was used, utilizing interviews, observations, and document studies. Findings show that POSBAKUM is moderately effective, although barriers remain in socialization and service infrastructure.

Keywords: POSBAKUM, access to justice, legal services, underprivileged communities

ABSTRAK

POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) berperan penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Bengkulu, dengan fokus pada faktor pendukung, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memanfaatkan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan menunjukkan bahwa POSBAKUM cukup efektif, meski masih terdapat hambatan dalam sosialisasi dan infrastruktur layanan.

Keywords: POSBAKUM, akses keadilan, layanan hukum, masyarakat tidak mampu

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam sistem hukum negara¹²

Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat tidak mampu di Indonesia menghadapi hambatan besar dalam mengakses keadilan. Hambatan ini bukan hanya terbatas pada keterbatasan finansial untuk menyewa jasa advokat, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan hukum yang sering kali membuat masyarakat ragu atau bahkan takut untuk terlibat dalam

¹ Andi Fajar Sjam Sawerilongi, Pengaruh Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Terhadap Kepuasan Pencari Keadilan Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a

² Soebagyo, S. A. (2023). *Efektivitas peran posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung). Semarang.

proses peradilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya informasi tentang prosedur hukum semakin memperburuk situasi ini³

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menginisiasi keberadaan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum). POSBAKUM adalah layanan bantuan hukum gratis yang disediakan di pengadilan untuk masyarakat tidak mampu. Fungsi utamanya adalah menyediakan layanan seperti pembuatan dokumen hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan selama proses pengadilan.

Di Pengadilan Agama Bengkulu, POSBAKUM memainkan peran penting dalam membantu masyarakat kurang mampu, khususnya dalam penyelesaian perkara perdata yang kerap menjadi masalah utama. Pengadilan ini melayani banyak pihak yang mencari keadilan, termasuk masyarakat pedesaan dengan tingkat pemahaman hukum yang rendah. POSBAKUM menjadi jembatan bagi mereka untuk memahami proses hukum, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan mendapatkan pendampingan selama proses peradilan⁴⁵

Meskipun demikian, efektivitas POSBAKUM masih menjadi pertanyaan penting. Banyak kendala yang dihadapi, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional yang dilatih khusus untuk memberikan layanan hukum, serta kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya layanan ini⁶. Di beberapa kasus, masyarakat bahkan tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses layanan gratis ini

Dalam konteks Pengadilan Agama Bengkulu, evaluasi terhadap efektivitas POSBAKUM menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana POSBAKUM berkontribusi dalam membantu masyarakat tidak mampu, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.

- **Sumber Data:** Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum dan laporan POSBAKUM
- **Teknik Pengumpulan Data:** Observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumen.
- **Analisis Data:** Menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1994), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

³ ibid

⁴ Andi Fajar Sjam Sawerilongi, Pengaruh Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Terhadap Kepuasan Pencari Keadilan Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a

⁵ Suprpto. (2024). "Efektivitas Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Batang". *Jurnal Deposisi*, 2(3), 294–310.

⁶ Mewujudkan, U., Hukum, K., Pengadilan, D., Mojokerto, N., 1a, K., Firdhauzya, R. A., & Isbandono, P. (n.d.). Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum Sebagai The Effectiveness of Posbakum Legal Aid Postal Services as an Effort to Realize Legal Justice at Mojokerto District Court Class 1A (Vol. 3, Issue 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Layanan POSBAKUM

Efektivitas layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Bengkulu dapat dinilai melalui beberapa indikator utama, yaitu kemampuan menyelesaikan kebutuhan hukum masyarakat, capaian target penerima layanan, dan tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan⁷.

1. Kemampuan Menyelesaikan Kebutuhan Hukum Masyarakat

POSBAKUM berperan penting dalam membantu masyarakat tidak mampu menghadapi permasalahan hukum, khususnya kasus perceraian, hak asuh anak, dan sengketa warisan. Mayoritas pengguna layanan ini berasal dari golongan ekonomi lemah yang memiliki pengetahuan hukum terbatas. Layanan POSBAKUM mencakup penyusunan dokumen hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan di pengadilan. Berdasarkan data tahunan Pengadilan Agama Bengkulu, sebanyak 150 kasus berhasil ditangani pada tahun 2023, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan gugatan perceraian

2. Capaian Target Penerima Layanan

Layanan POSBAKUM telah menunjukkan peningkatan dalam hal jumlah penerima manfaat. Meskipun demikian, cakupan layanan belum mencapai potensi penuh akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sebagian besar penerima layanan berada di wilayah perkotaan, sedangkan masyarakat di pedesaan masih sulit dijangkau. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan akses informasi yang memadai.

3. Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan

Survei kepuasan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima layanan merasa terbantu, terutama dalam hal konsultasi hukum gratis. Namun, terdapat keluhan terkait waktu tunggu yang cukup lama akibat keterbatasan jumlah staf yang bertugas di POSBAKUM

2. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan POSBAKUM

Meskipun POSBAKUM di Pengadilan Agama Bengkulu cukup efektif, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaannya, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Pendanaan untuk operasional POSBAKUM di Bengkulu sering kali tidak mencukupi untuk mendukung layanan secara optimal. Akibatnya, cakupan layanan menjadi terbatas, baik dalam hal jumlah penerima manfaat maupun kualitas layanan yang diberikan. Anggaran terbatas juga berdampak pada minimnya pengadaan fasilitas pendukung seperti ruang konsultasi dan teknologi administrasi

2. Minimnya Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas yang tersedia di POSBAKUM masih sangat terbatas, sehingga mereka sering kali kewalahan menghadapi banyaknya pengguna layanan. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi petugas membuat kualitas layanan tidak seragam dan kurang optimal di beberapa kasus

3. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat layanan POSBAKUM masih minim, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran

⁷ Suprpto. (2024). "Efektivitas Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Batang". *Jurnal Depositi*, 2(3), 294–310.

masyarakat terhadap layanan hukum gratis yang dapat diakses melalui POSBAKUM. Banyak masyarakat yang masih tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya

4. **Infrastruktur yang Tidak Memadai**

Fasilitas yang tersedia di POSBAKUM, seperti ruang konsultasi, masih terbatas dan tidak memadai. Kurangnya perangkat teknologi pendukung, seperti komputer untuk administrasi dan pencetakan dokumen hukum, juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan layanan⁸

3. Faktor Pendukung dan Hambatan Layanan POSBAKUM

1. **Faktor Pendukung**

a. **Dukungan Kebijakan:**

POSBAKUM memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan legitimasi dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin

b. **Kerja Sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH):**

Pengadilan Agama Bengkulu menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk meningkatkan cakupan layanan. LBH memberikan dukungan berupa tenaga profesional tambahan dan bantuan dalam pendampingan hukum

2. **Faktor Hambatan**

a. **Keterbatasan Fasilitas:**

Infrastruktur yang tersedia belum mendukung pelaksanaan layanan secara optimal. Kekurangan ruang konsultasi dan perangkat teknologi berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat

b. **Minimnya Kompetensi Petugas:**

Petugas POSBAKUM memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk menangani kasus hukum yang lebih kompleks. Minimnya pelatihan membuat petugas kesulitan menghadapi permasalahan hukum yang tidak standar atau membutuhkan pengetahuan⁹

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Bengkulu merupakan upaya yang sangat strategis dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Dengan menyediakan bantuan hukum gratis berupa pembuatan gugatan, konsultasi hukum, dan pendampingan selama proses peradilan, POSBAKUM telah menjadi jembatan penting bagi kelompok masyarakat yang sering kali terabaikan oleh sistem hukum formal

Berdasarkan hasil penelitian, POSBAKUM di Pengadilan Agama Bengkulu menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam hal penyelesaian kasus hukum dan tingkat

⁸ Sampul Luar, H., & Inayatullatifah, A. (n.d.). EFEKTIVITAS LAYANAN HUKUM POSBAKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA BATANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 63 TAHUN 2003.

⁹ Berdasarkan, A., Pemenuhan, K., Dan, H., & Masyarakat, P. (2021). KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI.

kepuasan penerima layanan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, di antaranya keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, minimnya sosialisasi layanan, dan infrastruktur yang belum memadai. Hambatan-hambatan ini mengurangi potensi maksimal dari layanan POSBAKUM dalam menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan

Meski demikian, dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menjadi landasan penting bagi keberlanjutan program ini. Kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkulu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga memperkuat kemampuan layanan POSBAKUM untuk memberikan solusi hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat miskin

Secara keseluruhan, POSBAKUM telah memainkan peran vital dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi perbaikan di berbagai aspek masih diperlukan agar layanan ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Bengkulu:

1. Peningkatan Sosialisasi

POSBAKUM perlu meningkatkan upaya sosialisasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, terutama mereka yang tidak memiliki akses informasi yang memadai. Kampanye informasi melalui media sosial, iklan radio lokal, dan kunjungan langsung ke desa-desa dapat menjadi strategi yang efektif. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam menyebarkan informasi tentang POSBAKUM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan ini.

2. Pengembangan Kapasitas Petugas

Pelatihan rutin bagi petugas POSBAKUM sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus-kasus hukum yang lebih kompleks. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis seperti penyusunan dokumen hukum, keterampilan komunikasi, hingga pengetahuan tentang hukum keluarga dan perdata yang sering menjadi permasalahan utama di Pengadilan Agama Bengkulu.

3. Peningkatan Anggaran Operasional

Pemerintah perlu mengalokasikan dana tambahan untuk mendukung operasional POSBAKUM. Dana ini dapat digunakan untuk menambah jumlah petugas, memperluas cakupan layanan, serta meningkatkan fasilitas seperti ruang konsultasi yang lebih layak dan perangkat teknologi yang mendukung.

4. Penyediaan Infrastruktur yang Memadai

Fasilitas pendukung, seperti ruang konsultasi yang nyaman dan perangkat teknologi untuk administrasi layanan, perlu ditingkatkan. Hal ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penerima layanan dan mendukung efisiensi kerja petugas

5. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan Hukum

POSBAKUM dapat menjalin kerja sama dengan universitas atau fakultas hukum di Bengkulu untuk melibatkan mahasiswa hukum sebagai tenaga pendukung. Ini tidak hanya mengurangi beban kerja petugas tetapi juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa

6. Evaluasi Berkala terhadap Layanan POSBAKUM

Evaluasi berkala sangat penting untuk menilai efektivitas layanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Laporan evaluasi dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan lembaga terkait lainnya.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan layanan POSBAKUM dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus memperkuat sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan di Bengkulu.

Daftar Pustaka

- Berdasarkan, A., Pemenuhan, K., Dan, H., & Masyarakat, P. (2021). KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI.
- Hamka, J., & Yth, K. (n.d.). KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PERSETUJUAN PEMBIMBING.
- Mewujudkan, U., Hukum, K., Pengadilan, D., Mojokerto, N., 1a, K., Firdhauzya, R. A., & Isbandono, P. (n.d.). Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum Sebagai The Effectiveness of Posbakum Legal Aid Postal Services as an Effort to Realize Legal Justice at Mojokerto District Court Class 1A (Vol. 3, Issue 1).
- Sampul Luar, H., & Inayatullatifah, A. (n.d.). EFEKTIVITAS LAYANAN HUKUM POSBAKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA BATANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 63 TAHUN 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Suprpto. (2024). "Efektivitas Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Batang". *Jurnal Deposisi*, 2(3), 294–310.
- Soebagyo, S. A. (2023). *Efektivitas peran posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung). Semarang.
- Andi Fajar Sjam Sawerilongi, Pengaruh Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Terhadap Kepuasan Pencari Keadilan Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a